



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKRASNO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG NON AKADEMIK**
3. NHK : **66988**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 743.326.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 739 m²/150 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 257.050.000
2. Tanah Seluas 90 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 51.760.000
3. Tanah Seluas 106 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 49.184.000
4. Tanah Seluas 169 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 76.586.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/100 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 239.200.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 69.546.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 280.000.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.051.364**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 2.096.963.850**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.314.589.512**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 5.466.930.726



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.466.930.726

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.